**GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Surat Kabar** | **:** | **Jurnal Nasional** | **Tgl/Bln/Thn** | **:** | **13 November 2007** |
| **Subyek** | **:** | **Perubahan Iklim** | **Hari** | **:** | **Selasa** |
| | | | **Halaman** | **:** | **06** |


# Menimbang REDD Dalam Isu Perubahan Iklim

KEMARIN, Senin (12/11), berlangsung sebuah seminar nasional bertajuk Pemanasan Global, Ancaman Masa Depan dan Solusi Penanggulangannya. Seminar yang digagas Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI) tersebut menghadirkan sekitar 200 peserta dari 17 provinsi di Indonesia.

Seminar ini menjadi penting, karena diselenggarakan menjelang Konferensi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) yang akan dilangsungkan di Bali, pertengahan bulan depan.

Kepala Bidang Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup, Dadang Hilman, yang tampil sebagai pembicara dalam seminar itu mengungkapkan, Indonesia memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi sebagai dampak terjadinya perubahan iklim.

Pasalnya, Indonesia merupakan negara kepulauan, terdiri dari 17.500 pulau yang menempatkannya sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Fakta lain, penduduk Indonesia yang mendiami kawasan pesisir sangatlah besar. Di sisi lain, perubahan iklim yang diakibatkan pemanasan global, salah satunya, berdampak pada peningkatan permukaan laut yang sangat potensial menenggelamkan pulau-pulau dan wilayah-wilayah pantai Indonesia.

Mengantisipasi itu, sebenarnya Indonesia tidak berdiam diri. Berbagai upaya telah dilakukan. Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan program Mekanisme Pembangunan Bersih atau biasa disebut CDM (*clean development mechanism*), program Menuju Indonesia Hijau yang penekanannya dilakukan daerah-daerah, dan yang paling aktual program Penurunan Emisi Rumah Kaca Melalui Upaya Pencegahan Deforestasi dan Kerusakan Hutan atau yang dikenal sebagai REDD (*Reducing Emission from Deforestation in Developing Country)*.

"Ketiganya merupakan program kunci untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim," kata Dadang yang hadir mewakili Menteri Lingkungan Hidup, Rachmat Witoelar.

Program REDD yang akan diusulkan Indonesia pada konferensi nanti, akan mengharuskan negara-negara maju yang terikat kewajiban menurunkan emisinya untuk memberikan kompensasi kepada negara yang mau menjaga hutannya. Dan Indonesia,

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

yang memiliki kawasan hutan sangat besar, berpotensi meraih keuntungan secara ekonomi. Namun, hingga saat ini, kontroversi masih menyelimuti program REDD.

YS Kusumah, Ketua IARMI Universitas Jayabaya yang menjadi ketua panitia seminar mengungkapkan, konsep REDD merupakan upaya Amerika, sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim, untuk mengalihkan perhatian dunia atas kegagalannya mematuhi Protokol Kyoto.

Konsep ini sengaja dititipkan melalui Indonesia sebagai tuan rumah konferensi. Pemanfaatan konsep REDD ini akhirnya akan menempatkan Indonesia, sebagai negara yang lebih bertanggung jawab dibanding Amerika sendiri, di mana hutan Indonesia harus menjadi penyerap karbon bagi limbah atau emisi gas rumah kaca dari Amerika dan negara-negara maju lainnya.

"Untuk itu, kami menolak konsep REDD yang memosisikan Indonesia lebih bertanggung jawab terhadap pemanasan global dan perubahan iklim daripada Amerika," kata Kusumah.

Ketua Masyarakat Peduli Hutan, Lili Muslihat mengingatkan, peningkatan permukaan laut memiliki implikasi negatif yang tidak kecil bagi Indonesia. Prediksinya, akan menimbulkan konflik sosial, peningkatan angka kemiskinan, terendamnya lahan-lahan subur, gelombang urbanisasi besar-besaran, dan mengacaukan batas wilayah dengan negara lain. Dampak lain, potensi hilangnya aset ekonomi, sosial dan budaya milik Indonesia yang berada di wilayah pesisir dan kepulauan.

Karenanya, kompensasi dunia yang bakal diberikan kepada Indonesia sebagai paru-paru dunia harus diperhitungkan secara rasional dan detil. "Kompensasi harus betul-betul dihitung berdasarkan besarnya aset-aset yang hilang, agar berkeadilan bagi Indonesia," kata Lili.

Tentu saja, kompensasi tersebut tidak boleh bernilai "tidak seberapa". Pasalnya, perubahan iklim bukan sekadar berpotensi menenggelamkan wilayah-wilayah pesisir dan kepulauan Indonesia. Kita mesti ingat, Indonesia merupakan negara maritim, didominasi wilayah laut. Jadi, dalam kurun waktu tertentu, bisa saja negara ini hilang, menjadi lautan

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP